

BAB II

KOTA YOGYAKARTA DAN MARGINALISASI ISU LINGKUNGAN

2.1 Desakan terhadap Daya Dukung Lingkungan

Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi DIY dan satu-satunya daerah yang berstatus kota di samping empat daerah tingkat II lainnya seperti Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Dari segi luas, Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km² atau 1.02% dari luas wilayah Provinsi DIY (BPS Kota Yogyakarta, 2018). Dengan luas tersebut, Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT dan dihuni oleh penduduk yang jumlahnya setiap tahun meningkat. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 392.506 jiwa dan bertambah menjadi 417.744 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 13.007 jiwa/km² di tahun 2017 (Statistik Lingkungan Hidup DIY 2017/2018). Adapun faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk tersebut terbilang cukup tinggi ada 3, yaitu; (1) pertumbuhan secara alamiah, (2) migrasi (angka urbanisasi), dan (3) reklasifikasi daerah pinggiran kota (Kabupaten Bantul dan Sleman).

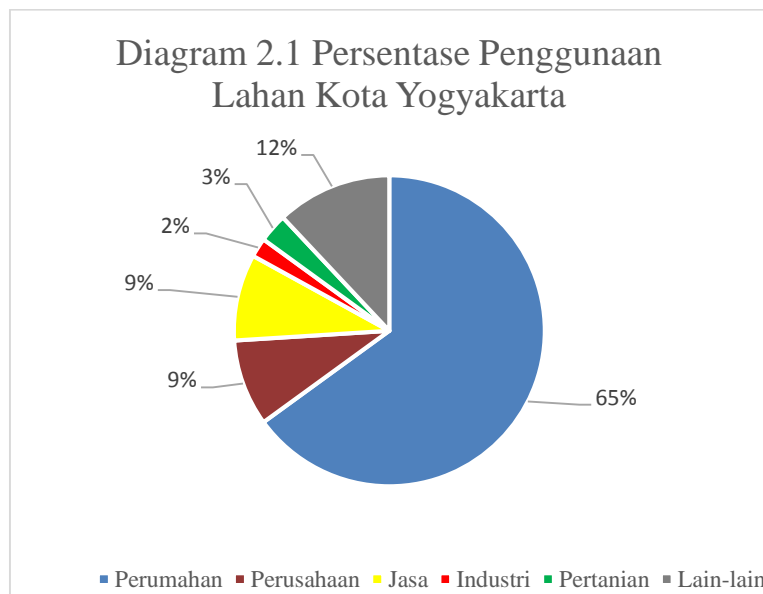
Dengan demikian, dalam kondisi luas lahan yang sangat terbatas, kemudian jumlah penduduk semakin bertambah dan padat, maka alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan maupun aktivitas perekonomian pun meningkat. Sebagai contoh di Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan, alih fungsi lahan dominan menjadi bangunan di dua Kecamatan tersebut.

Tabel 2.1 Pola Perubahan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017

No.	Perubahan	Luas (Ha)	Kecamatan
			Tegalrejo
1	Kebun menjadi lahan tidur	0,50	
2	Lahan perkerasan menjadi bangunan	0,89	
3	Lahan tidur menjadi bangunan	5,27	
4	Lahan tidur menjadi lahan perkerasan	0,86	
5	Sawah menjadi bangunan	4,04	
6	Sawah menjadi kebun	0,23	
7	Sawah menjadi lahan perkerasan	0,06	
8	Sawah menjadi lahan tidur	4,64	
9	Taman pekarangan menjadi bangunan	2,39	
10	Taman pekarangan menjadi lahan perkerasan	0,49	
11	Taman pekarangan menjadi lahan tidur	0,25	
12	Tidak berubah	256,53	
Luas Wilayah		276,14	
			Wirobrajan
1	Lahan perkerasan menjadi bangunan	0,62	
2	Lahan tidur menjadi bangunan	2,32	
3	Lahan tidur menjadi lahan perkerasan	0,42	
4	Lahan tidur menjadi parkir	0,47	
5	Taman pekarangan menjadi bangunan	1,97	
6	Taman pekarangan menjadi lahan perkerasan	0,34	
7	Taman pekarangan menjadi lahan tidur	0,96	
8	Tidak berubah	157,18	
Luas Wilayah		164,29	

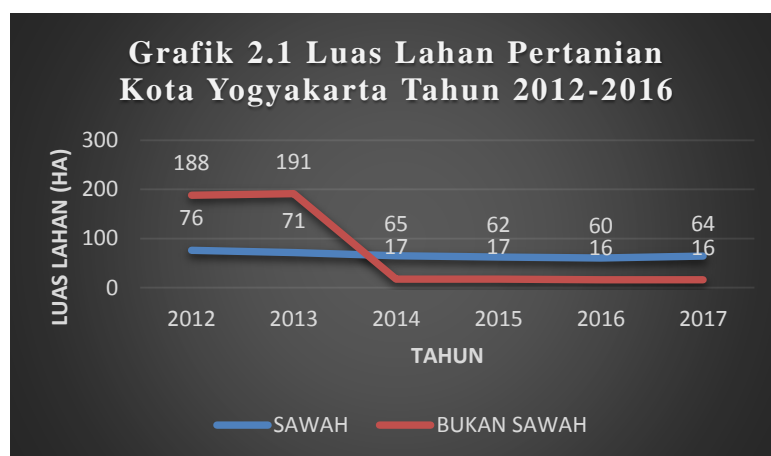
(Sumber: Taurizina & Firdaus, 2017 diolah)

Berdasarkan tabel di atas, alih fungsi lahan dominan menjadi bangunan. Selain itu, perubahan RTH paling banyak terjadi pada sawah dengan empat pola perubahan di Kecamatan Tegalrejo. Lebih jelas, persentase penggunaan lahan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam diagram berikut.



(Sumber; Web Dispmperezinan Kota Yogyakarta, 2019)

Dari diagram di atas, penggunaan lahan Kota Yogyakarta paling banyak diperuntukkan untuk perumahan. Sementara, pertanian hanya sebanyak 3%. Selain itu, berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, luas lahan pertanian terutama pada sawah terus berkurang (Grafik 2.2).



(Sumber: Statistik Lingkungan Hidup DIY 2012-2017, diolah)

Dari grafik di atas, dari tahun ke tahun lahan pertaniann di Kota Yogyakarta baik sawah maupun non sawah terus mengalami penyusutan. Bahkan penyusutan

lahan pertanian non sawah sangat drastis terjadi di tahun 2014, dan kemudian di tahun 2017 luasnya menjadi bertambah. Maka penambahan luas lahan pertanian tersebut patut dipertanyakan, bagaimana dan faktor apa yang menyebabkan penambahan luas? Sehingga, apabila ditemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sebagaimana yang telah dijelaskan di muka dapat dikontrol dan terkendali dengan baik.

Apabila hal tersebut diabaikan, maka bukan tidak mungkin lambat laun akan mendesak daya dukung lahan terutama dalam memproduksi bahan makanan, kemudian untuk kegiatan menanam tanaman yang sangat berperan dalam menyaring emisi CO₂ sebagai gas rumah kaca, serta fungsi hidrologinya. Dan tanda-tanda ini sudah mulai terlihat dari inflasi yang terjadi di Kota Yogyakarta. Di mana pada laju inflasi Kota Yogyakarta yang sangat tinggi, beberapa komoditas khususnya air dan bahan makanan angka inflasinya tinggi, bahkan berada di atas angka nasional (Statistik Daerah Kota Yogyakarta, 2018: 26-27).

Air dan bahan makan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam pemenuhannya. Air yang tersedia dan melimpah ruah di alam raya, harusnya bisa memenuhi kebutuhan penduduk. Kemudian, dari kondisi geografis Kota Yogyakarta yang berada di lereng Gunung Merapi, tanahnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanisme muda yang sangat cocok untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perdagangan, harusnya mendukung untuk produksi bahan makanan. Akan tetapi, dengan adanya inflasi atau kenaikan harga di dua komoditas tersebut mengindikasikan bahwa dua komoditas tersebut menjadi langka, akses terhadapnya sudah dikendalikan oleh korporasi, dan penduduk sangat bergantung padanya.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta di tahun 2017 mencapai 5,24% meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 5,11%. Secara regional, pertumbuhan ekonomi tersebut berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY yang mencapai 5,26%. Kemudian, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, inflasi pada kebutuhan primer seperti air dan bahan makanan sebagai pertanda daya dukung lahan pertanian semakin berkurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas warga dan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dalam urusan ekonomi telah abai terhadap daya dukung lingkungan. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya permasalahan atau degradasi lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta, seperti berikut ini.

2.2.1 Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Minimnya RTH di Kota Yogyakarta merupakan akibat dari maraknya alih fungsi lahan menjadi bangunan permukiman, bangunan komersial, jalan raya, dan bangunan fisik lainnya sebagai prasarana penunjang aktivitas warga. Lebih detailnya, Taurizina (2017:8-9) dalam temuannya telah mencatat perubahan luas dan pola perubahan penggunaan RTH Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan sejak tahun 2007 hingga 2017. Dan dari temuan tersebut, secara keseluruhan pola perubahan RTH memang paling banyak menjadi bangunan.

Fenomena minimnya RTH ini berbanding terbalik dari kondisi awal dibangunnya Kota Yogyakarta yang dahulunya merupakan kawasan hutan. Udara yang sejuk, teduh, air yang bersih, dan suasana asri tampaknya sangat jauh. Padahal, keberadaan RTH diakui memiliki banyak fungsi seperti fungsi estetika, pendidikan,

ekonomi, dan terutama fungsi ekologisnya yaitu menyerap kadar CO₂, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan dari tanaman, menjadi area resapan air, hingga meredam kebisingan.

2.2.2 Polusi Udara

Ada dua faktor yang menyebabkan kualitas udara di Kota Yogyakarta sangat buruk, yaitu karena maraknya pembukaan lahan hijau menjadi bangunan perumahan, bangunan komersial, hingga jalan raya, dan faktor laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tiap tahunnya meningkat. Sesuai dengan temuan Mukarromah dan Slamet (2014: 5) yang menyebutkan bahwa, keberadaan jalan yang menjadi akses keluar masuk kendaraan menyebabkan konsentrasi pencemar udara tergolong tinggi di suatu kawasan. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Astuti & Thoha (2017: 7) yang mengungkapkan bahwa, dari 10 titik keramaian di Kota Yogyakarta yang jalannya selalu padat dilalui oleh kendaraan bermotor, kandungan CO₂ tinggi, bahkan angkanya berada di atas ambang batas yang seharusnya di bumi (sekitar 381 ppm) dan suhunya berada di atas 300 Celcius. Di mana Emisi CO₂ ini paling banyak ada di titik 0 KM Yogyakarta (973,2 ppm), kemudian disusul oleh lingkungan Taman Pintar (496,8 ppm), dan bundaran ugm (450,1 ppm).

Adapun hubungan antara polusi udara dengan kendaraan bermotor ialah, semakin banyak kendaraan bermotor maka penggunaan bahan bakar penghasil polutan pun semakin banyak. Berdasarkan data dari BPS Kota Yogyakarta, sejak 2014 hingga 2017 jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan hingga mencapai 507.332 unit di tahun 2017. Dari lima jenis kendaraan bermotor yang ada

di Kota Yogyakarta, yang paling banyak jumlahnya ialah sepeda motor (Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2018, 2018: 23).

2.2.3 Krisis dan Buruknya Kualitas Air

Permasalahan lingkungan pertama di Kota Yogyakarta ialah kualitas air yang memburuk karena tercemar bakteri. Selain itu, akses terhadap air juga terganggu akibat sumur-sumur warga mengalami kekeringan. Hal ini sesuai dengan temuan khususnya di Kecamatan Kraton (Mukarromah dan Slamet, 2014: 5-6). Di mana pada beberapa titik kualitas air tanah buruk terutama pada bagian tengah pemukiman padat. Sementara, di Kecamatan yang berbeda yaitu di Kecamatan Umbulharjo, menurut pengakuan warga, air sumur menjadi kering akibat konsumsi air oleh hotel yang mempengaruhi ketersediaan air sumur warga yang dulunya melimpah (wawancara Dodok Putra Bangsa, 22/01/2018).

Krisis air tersebut juga dapat dijelaskan berdasarkan data dari BPS Kota Yogyakarta yang menunjukkan bahwa, pelanggan air minum di PDAM Tirtamarta berdasarkan kelompok pelanggan sejak 2015 hingga 2017 paling banyak berasal dari kelompok non niaga yang terdiri dari rumah tangga dan instansi pemerintah (Statistik Daerah Kota Yogyakarta, 2018: 18). Artinya, kondisi krisis air yang dirasakan oleh warga menyebabkan mereka memilih untuk mengonsumsi air dari PDAM. Hal ini dikarenakan warga lebih percaya dengan kualitas air yang disediakan oleh PDAM, meskipun pada kenyataannya tidak sepenuhnya terjamin bebas polutan dan bakteri. Selain itu, jika harus mengonsumsi langsung dari sumur warga, prosesnya cukup ribet, yaitu kualitas air harus diuji terlebih dahulu di Laboratorium Dinas Kesehatan.

2.2.4 Sampah

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini menyebabkan kebutuhan konsumsi khususnya makanan pun semakin bertambah. Berdasarkan data dari BPS Kota Yogyakarta, tercatat persentase pengeluaran per kapita penduduk Kota Yogyakarta tahun 2017 untuk kelompok makanan paling banyak ialah makanan dan minuman jadi, tembakau, dan sirih yaitu sebesar 24,67%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 21,44% (Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2018, 2018: 27).

Budaya konsumsi warga Kota Yogyakarta terhadap makanan dan minuman jadi tersebut berdampak terhadap meningkatnya sampah terutama dari kemasan plastik minuman dan makanan yang dibeli. Kemudian, sebagai akibat reklasifikasi dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) dalam upaya menangani masalah sampah tersebut (Nurmandi, 2014: 34), di mana Bantul tepatnya lahan di Piyungan dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Kemudian, dalam temuan Mulasari (2016: 101) mengungkapkan bahwa Kota Yogyakarta dari tahun 2009 sampai dengan 2014 selalu menjadi penyumbang sampah terbesar di TPA Piyungan. Selain itu, sampah Kota Yogyakarta juga telah mencemari air dan udara di kawasan yang sekarang dijadikan sebagai TPA, khususnya di Desa Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul. Lebih dari itu, sampah tersebut juga ikut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas sapi ternak warga Piyungan akibat mengomsumsi sampah plastik.

Dari beberapa permasalahan lingkungan yang dipaparkan di atas, seperti minimnya RTH, polusi udara, krisis dan buruknya kualitas air, sampah, hingga sikap atau perilaku warga terhadap lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa

kualitas lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terbilang buruk. Kemudian, jika dikaji lebih jauh sebagaimana hasil temuan Mukarromah dan Slamet (2014: 9), buruknya kualitas lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Tingginya kepadatan pemukiman yang berdampak terhadap pembangunan saluran tinja dan pembuatan sumur galian.
- b. Minimnya RTH karena keterbatasan lahan yang berdampak pada air, udara, tumbuhan, dan hewan, serta sosial masyarakat.
- c. Kesadaran dalam bentuk sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat kurang dan tidak sesuai dengan pengetahuan lingkungan yang dimilikinya.

2.3 Gerakan Lingkungan Perkotaan

Berangkat dari berbagai permasalahan lingkungan Kota Yogyakarta seperti yang dipaparkan di atas, maka gerakan lingkungan menjadi sangat penting untuk mengatasi degradasi lingkungan yang terjadi. Sebab, jika tidak segera diatasi dengan tepat, tidak hanya berdampak terhadap semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, tetapi juga akan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang merugikan warga kota. Di mana minimnya RTH menyebabkan bencana banjir karena fungsi ekologinya telah hilang. Kemudian, semakin berkuarngnya tanaman khususnya di daerah pinggiran sungai yang padat pemukiman, potensi bencana tanah longsor dan korban akan meningkat.

Begitu juga di Kota Yogyakarta, dalam merespon degradasi lingkungan yang ada, berbagai aktor mulai dari pemerintah, hingga warga kota sendiri secara

bersama-sama telah mengupayakan kondisi lingkungan Kota Yogyakarta agar tetap lestari. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Yogyakarta khususnya pada misi ke-5, yaitu memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan. Di mana gerakan lingkungan yang muncul di Kota Yogyakarta telah mengundang respon dari berbagai aktor seperti yang diuraikan berikut ini.

Pada isu lingkungan yang pertama, yaitu masalah air telah mendapat respon dari beberapa aktor gerakan lingkungan seperti *Earth Hour* (EH) Jogja, DLH Kota Yogyakarta, Sha-Link, dan MLH PDM Kota Yogyakarta. EH Jogja merespon minimnya RTH di Kota Yogyakarta dengan melakukan aksi Hari Kasih Taman di titik Nol Kilometer Yogyakarta pada 14 Februari 2015. Selain melakukan aksi kampanye kepada masyarakat luas, EH Jogja juga melakukan audiensi ke DLH, Bappeda, hingga Pemerintah DIY untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain itu, EH juga memasifkan gerakannya melalui program *Baby Three Friends* yaitu dengan memberikan donasi dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menanam pohon (Apriando, 2014).

Respon berikutnya datang dari aktor DLH Kota Yogyakarta yaitu melalui program tamanisasi dan perindangan jalan. Program yang ditujukan untuk mengatasi masalah RTH Kota Yogyakarta tersebut lebih kepada pengadaan RTH publik, di mana dalam perawatan dilakukan oleh aktor DLH Kota Yogyakarta itu sendiri. Sementara untuk warga sendiri, masih banyak yang acuh bahkan tidak merasa bertanggungjawab dalam menjaganya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak warga yang mengotori RTH publik dengan membuang sampah sembarangan.

Respon selanjutnya datang dari aktor Sha-link yaitu melalui program menanam pohon, meskipun dalam prakteknya hanya beberapa warga saja yang ikut terlibat (<http://citralekha.com/shalinkers2/>, diakses 20 Desember 2018). Adapun respon terakhir terhadap isu RTH datang dari aktor MLH PDM Kota Yogyakarta yaitu melalui program Eco-Masjid. Di mana MLH PDM Kota Yogyakarta memasifkan gerakan penghijauan di masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu dengan mengadakan tanaman di masjid Muhammadiyah. Berbagai bentuk respon terhadap minimnya RTH ini juga berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara di Kota Yogyakarta.

Kemudian pada isu lingkungan Kota Yogyakarta yang kedua yaitu polusi udara telah mendapat respon dari beberapa aktor gerakan lingkungan seperti KOPHI Jogja, KLH RI, DLH Kota Yogyakarta, dan MLH PDM Kota Yogyakarta. Dari semua aktor yang ikut terlibat dalam upaya penyelesaian terhadap masalah polusi udara ini, hanya beberapa aktor yang dapat dinilai benar-benar fokus terhadap isu ini, yaitu aktor KOPHI Jogja dan KLH RI. Respon pertama datang dari aktor KOPHI Jogja. Meskipun tidak secara terang-terangan mengklaim gerakannya dalam melakukan upaya perbaikan terhadap kualitas udara Kota Yogyakarta, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh ternyata dalam proses rekrutmen keanggotaan, KOPHI Jogja tidak menerima seorang perokok sebagai anggotanya. Hal ini jelas berkontribusi dalam mengurangi polusi udara yang ada.

Selanjutnya, respon KLH RI di sini dapat dinilai dari program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dengan cara menurunkan tingkat pencemaran udara dari sektor transportasi, khususnya kendaraan bermotor (Hidayah, 2018). Namun, jika dikaji

lebih jauh sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa polusi udara di Kota Yogyakarta tidak hanya disebabkan oleh emisi CO₂ yang dihasilkan sektor transportasi, maka langkah ini dianggap masih kurang begitu efektif untuk menghilangkan sumber polusi udara.

Kemudian, respon dari aktor lainnya seperti DLH Kota Yogyakarta dan MLH PDM Kota Yogyakarta dapat dinilai dari program pengelolaan sampah yang dilakukan, di mana pengelolaan sampah berkontribusi dalam mengurangi emisi CO₂ dari produksi sampah yang tidak tertangani atau dibakar begitu saja. Sebab sampah juga merupakan faktor meningkatnya emisi CO₂ (Wikansari & Nurjani, 2018). Program pengelolaan sampah DLH Kota Yogyakarta yang paling terbaru ialah program Ecobrick yang menggandeng beberapa Bank Sampah untuk dioptimalisasi implementasinya di lapangan. Sedangkan, program pengelolaan sampah yang terbaru dari MLH PDM Kota Yogyakarta ialah program Shodaqoh Sampah dengan konsep yang unik dan akan dijelaskan pada sub bagian berikutnya.

Adapun pada isu lingkungan Kota Yogyakarta yang ketiga yaitu krisis dan buruknya kualitas air, terdapat beberapa aktor gerakan lingkungan yang tampak aktif merespon isu tersebut, seperti DLH Kota Yogyakarta, Jogja Asad, WALHI Jogja, KOPHI Jogja, dan MLH PDM Kota Yogyakarta. Respon DLH Kota Yogyakarta terlihat dari program pembuatan IPAL UKM (industri tahu tempe dan laundry) dan IPAL fasilitas kesehatan, pembuatan sumur pantau limbah B3, dan gerakan bersih sungai yang dilakukan. Kemudian, respon Jogja Asad dilihat dari aksi protesnya dengan teaterikal mandi tanah di depan hotel, hingga aksi protes melalui tradisi buang bala seperti yang dilakukan baru-baru ini di depan kantor Walikota Yogyakarta.

Selanjutnya, WALHI Jogja merespon isu air melalui aksi kampanye dengan berkolaborasi bersama masyarakat seperti memproduksi film “Belakang Hotel” yang bekerja sama dengan Jogja Asad dan Warga Berdaya lainnya, serta Watchdog. Sementara, respon dari aktor KOPHI Jogja terlihat dari kegiatan pemantauan terhadap perkembangan sungai binaan yaitu dengan melepas 3000 bibit ikan di Bintaran Kulon tahun 2012 untuk memantau kualitas air sungai. Dan terakhir, isu air di Kota Yogyakarta mendapat respon dari aktor MLH PDM Kota Yogyakarta yaitu melalui program Sekolah Sungai dan gerakan Memanen Air Hujan yang digalakan.

Terakhir, respon pada isu lingkungan Kota Yogyakarta yang keempat yaitu masalah sampah datang dari aktor DLH Kota Yogyakarta, Sha-Link, Lintas Jogja Group, dan MLH PDM Kota Yogyakarta. Respon DLH Kota Yogyakarta terlihat dari program pembuatan pupuk kompos, Ecobrick dan kegiatan menanam hidroponik menggunakan sampah plastik dengan menggandeng Bank Sampah, serta gerakan aksi bersih sampah yang dilakukan selama tiga bulan (21 Januari-21 April 2018) dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2018. Selanjutnya, respon dari aktor Sha-link dilihat dari aksi membersihkan sungai-sungai di Kota Yogyakarta. Kemudian, respon dari aktor Lintas Jogja Group yang paling terkenal ialah aksi memungut dan mengumpulkan sampah-sampah yang tercecer di trotoar kawasan Titik Nol Kilometer dan Malioboro, yang kemudian dibuang ke TPS dekat pasar Bringharjo. Sedangkan aktor MLH PDM Kota Yogyakarta merespon isu sampah di Kota Yogyakarta melalui kegiatan pembuatan pupuk kompos, pengolahan sampah rumah tangga, dan gerakan Shodaqoh Sampah.

Berdasarkan uraian tentang respon beberapa aktor gerakan lingkungan terhadap empat isu lingkungan di Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, MLH PDM Kota Yogyakarta sebagai bagian dari ormas Muhammadiyah atau civil Islam yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Kota Yogyakarta pun turut menyorot persoalan lingkungan. Komitmen Muhammadiyah dalam menjaga lingkungan direalisasikan dengan dibentuknya MLH. Adapun dalam gerakannya, MLH Muhammadiyah berfokus pada pendidikan yaitu dengan membentuk Sekolah Sungai Muhammadiyah, yang kemudian dijadikan sebagai percontohan Sekolah Sungai di Indonesia. Selain itu, seperti yang terpublis di beberapa akun sosial medianya, MLH Muhammadiyah juga baru-baru ini menggalakkan program Shodaqoh Sampah, Eco Masjid, dan gerakan Memanen Air Hujan sebagai bentuk keperdulianya terhadap masalah lingkungan.

Selanjutnya, apabila ditelusuri lebih dalam, MLH Muhammadiyah menjadi menarik untuk dikaji dilihat dari pemilihan lokasi dalam praktek atau pelaksanaan program-programnya. Di mana masjid, sekolah, dan perguruan tinggi menjadi lokasi pertama yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pendidikan lingkungan. Dan langkah ini dinilai memiliki peluang yang besar dalam upaya memasifkan gerakan lingkungan di Kota Yogyakarta, mengingat jumlah masjid dan sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta terbilang cukup banyak. Hal ini sesuai dengan penuturan pak Hery Setiawan dalam acara Kongres Memanen Air Hujan 2018 (27/12/2018), yang menuturkan bahwa:

“Jumlah masjid Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sebanyak 400 buah lebih, sedangkan jumlah sekolah Muhammadiyah sebanyak 60 buah”.

Jumlah masjid se-kota Yogyakarta tahun 2014 yaitu sebanyak 494 buah (Kemenag DIY, 2018). Dibandingkan dengan jumlah masjid Muhammadiyah sebanyak 400 atau 80,97% dari jumlah masjid se-kota Yogyakarta tersebut. Dengan demikian, jangkauan program MLH PDM Kota Yogyakarta melalui dakwahnya dari masjid ke masjid secara optimal akan lebih leluasa dalam menjangkau warga Kota Yogyakarta yang 82,88% merupakan penduduk muslim.

Kemudian, jumlah sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017 yaitu sebanyak 318 buah (Statistik Daerah Kota Yogyakarta, 2018: 13). Artinya, 18,87% dari total jumlah sekolah di Kota Yogyakarta merupakan sekolah Muhammadiyah. Dengan demikian, jangkauan program MLH PDM Kota Yogyakarta tidak hanya akan sampai kepada warga Muhammadiyah, tetapi sampai juga kepada warga di luar Muhammadiyah, atau warga Kota Yogyakarta secara umum. Hal ini dikarenakan murid di sekolah tidak hanya berasal dari warga Muhammadiyah, bahkan lebih luas lagi murid tersebut juga berasal dari luar Kota Yogyakarta. Dengan demikian, harapannya setelah murid-murid tersebut mendapatkan pendidikan lingkungan, mengenal, bahkan terlibat langsung di beberapa program atau kegiatan lingkungan, mereka bisa menerapkannya kembali sebagai suatu budaya di lingkungan tempat tinggal sendiri.

2.4 Gerakan Lingkungan Muhammadiyah

Sebelum kepada penjelasan tentang MLH PDM Kota Yogyakarta khususnya, sangat penting untuk memahami gerakan lingkungan Muhammadiyah secara umum. Hal ini dikarenakan kedudukan MLH PDM Kota Yogyakarta di sini

menjalankan fungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan di bidang lingkungan. Dengan begitu, penjelasan terkait MLH PDM Kota Yogyakarta dimulai dari penjelasan tentang visi dan misi MLH Muhammadiyah, kedudukan dan program MLH Muhammadiyah, hingga tugas dan pokok MLH Muhammadiyah secara umum.

2.4.1 Visi dan Misi MLH Muhammadiyah

Visi MLH Muhammadiyah ialah terwujudnya kesadaran, kepedulian dan perilaku ramah lingkungan warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka melaksanakan amar ma'kruf nahi mungkar, yang dalam upaya mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam empat misi, antara lain:

- a. Melakukan kajian lingkungan secara obyektif, menyeluruh dan berkeadilan sebagai masukan yang akurat kepada Pimpinan dan warga Muhammadiyah serta masyarakat pada umumnya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan dak'wah lingkungan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat.
- c. Melakukan advokasi kepada masyarakat dan mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pembuatan dan implementasi kebijakan lingkungan yang berkeadilan serta berkelanjutan.
- d. Menjalin kerjasama yang setara dan bersinergi dengan majelis dan/atau lembaga internal Muhammadiyah dan institusi lingkungan di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan lingkungan.

2.4.2 Kedudukan dan Program MLH Muhammadiyah

Pada dasarnya, majelis ataupun lembaga di lingkungan Muhammadiyah merupakan unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan yang berfungsi sebagai pelaksana program Muhammadiyah sesuai jenis dan bidang yang ditangani. Di mana dalam penentuan kebijakannya harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Persyarikatan, tidak boleh melampaui kewenangan Pimpinan Persyarikatan dan melampaui fungsi masing-masing sebagai unsur pembantu Pimpinan. Selain itu, majelis ataupun lembaga melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat operasional dan penjabaran yang bersumber dari program nasional/pusat hasil muktamar sesuai dengan prinsip pengorganisasian, pelaksanaan, dan penjabaran program di tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting, organisasi otonom, dan amal usaha Persyarikatan sesuai dengan kewenangan, kepentingan, dan kondisi masing-masing (Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 2015).

Kemudian, pembahasan terkait program MLH Muhammadiyah erat kaitannya dengan program Muhammadiyah secara umum yang meliputi program jangka panjang (2005-2025) dan jangka menengah (5 tahun) yang sekarang memasuki periode lima tahun ketiga (2015-2020). Adapun program Muhammadiyah dirumuskan melalui musyawarah di setiap tingkatan dan terbagi dalam dua aspek. Pertama, visi pengembangan yaitu kondisi yang ingin diwujudkan sebagai tujuan khusus dari setiap program Muhammadiyah. Kedua, program pengembangan yaitu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui jenis-jenis kegiatan dari program Muhammadiyah tersebut (Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47, 2015: 8). Selain itu, program Muhammadiyah juga dikategorisasikan ke dalam dua aspek, yaitu:

- a. Program umum, yaitu rangkaian kegiatan yang bersifat lintas aspek dan lintas majelis/lembaga yang koordinasinya langsung oleh Persyarikatan atau Majelis/Lembaga tertentu atau badan lain yang dimandati Pimpinan Persyarikatan untuk menjadi coordinator dalam pelaksanaan program tersebut.
- b. Program perbidang, yaitu rencana kegiatan yang bersifat aspek tertentu, yang pelaksanaannya di bawah Majelis/Lembaga tertentu, yang terdiri dari 21 bidang. Salah satunya ialah Bidang Lingkungan Hidup yang secara khusus akan dipaparkan dalam penelitian ini.

Adapun visi pengembangan dan program pengembangan Bidang Lingkungan Hidup ialah sebagai berikut.

- a. Visi pengembangan, yaitu terwujudnya kondisi, budaya, dan struktur lingkungan hidup yang ramah, aman, produktif, dan berkelanjutan bagi kelangsungan masa depan kehidupan.
- b. Program pengembangan yang terdiri dari:
 - a) Sistem Gerakan: Mengembangkan konsep dan model gerakan lingkungan hidup berpraxis dakwah.
 - b) Organisasi dan Kepemimpinan: Mengembangkan kapasitas dan fungsi kelembagaan di lingkungan Persyarikatan dalam pengembangan kesadaran, kepedulian, dan advokasi lingkungan hidup.
 - c) Jaringan: Menjalinkan kerjasama yang setara, bersinergi, dan saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah dan

swasta di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan.

- d) Sumber Daya: Menghasilkan kader dan warga sadar lingkungan yang memiliki concern dan keberpihakan pada usaha-usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan.
- e) Aksi Pelayanan: Menyusun model-model praksis, pendidikan dan pelatihan, buku-buku panduan, dan advokasi yang berkaitan dengan isu-isu dan usaha penyelamatan lingkungan. Dan memberikan layanan Audit Lingkungan Mandiri (ALIM) pada lembaga-lembaga di lingkungan Muhammadiyah.

2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi MLH Muhammadiyah

Berikut tugas pokok MLH Muhammadiyah sebagaimana yang termuat dalam website MLH PPM (Muhammadiyah, 2018), antara lain:

- a. Mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang dimotori oleh majelis terkait, guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dunia usaha, yang cenderung mengabaikan etika lingkungan.
- c. Melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.

2.4.4 Profil MLH PDM Kota Yogyakarta

Program Muhammadiyah secara umum dan keseluruhan berada dalam tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di mana pelaksanaan dan penjabaran program berada di tingkat daerah sebagai pusat administrasi pelaksanaan program. Artinya, PDM menjadi pusat administrasi pelaksanaan program dengan pertimbangan lebih dekat ke arus bawah yakni cabang dan ranting, serta lebih realistis dalam melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan program Muhammadiyah sesuai dengan orientasi otonomi dan operasional program dari bawah atau *bottom-up* (Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 2015). Dengan kata lain, program-program MLH PDM Kota Yogyakarta sebenarnya merupakan rincian dari program yang berasal dari pusat (MLH PP Muhammadiyah), meskipun tidak semua program diinisiasi dari pusat. Atau, sebagian program juga diinisiasi dan dikembangkan oleh wilayah, daerah, maupun cabang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

2.4.4.1 Program MLH PDM Kota Yogyakarta

Program MLH PDM Kota Yogyakarta saat ini sudah memasuki periode lima tahun ketiga (2015-2020). Adapun program MLH PDM Kota Yogyakarta terdiri dari:

- a. Sekolah Sungai.
- b. Eco Masjid.
- c. Pengelolaan limbah rumah tangga.
- d. Pembuatan pupuk kompos.
- e. Shodaqoh Sampah, dan
- f. Memanen Air Hujan.

Dari semua program lingkungan tersebut, baik yang diinisiasi oleh pusat maupun daerah, pada umumnya pendidikan lingkungan menjadi program utama untuk dapat menghambat bahkan menghentikan kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Adapun indikator keberhasilan dalam setiap program MLH PDM Kota Yogyakarta ialah, terjadinya perubahan pola pikir manusia terhadap lingkungan dalam bentuk perubahan perilaku yang ramah lingkungan. Hal inilah yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan pak Hery Setiawan selaku Ketua MLH PDM Kota Yogyakarta (27/12/2018).

2.4.4.2 Susunan Anggota MLH PDM Kota Yogyakarta

Tabel 2.2 Susunan Anggota MLH PDM Kota Yogyakarta
Tahun 2015-2020

Ketua	Hery Setiawan, M.Si.
Wakil Ketua 1	Ir. Moh. Natsir Hadiprayitno
Wakil Ketua 2	Ir. Ahmad Musofie, MS., MM., APU.
Sekretaris	Agus Sutrisno, S.Ag.
Bendahara	Ir. Niniek Kusuma Wardhani., MS., Apu.
Anggota	1. Ir. Moh. Anwar
	2. Ir. Abdul Haris
	3. Heru Surso, SH.
	4. Haris Syarif Usman, SH.
	5. Widi Priasto
	6. Intinanul Ikhwan
	7. Miftahi Bardan, SH.

(Sumber: MLH PDM Kota Yogyakarta, 2018)

MLH di tingkat pusat hingga tingkat yang terendah yaitu PCM, jumlah dan keanggotaannya berbeda-beda. MLH PDM Kota Yogyakarta khususnya pada periode 2015-2020 beranggotakan sebanyak 12 orang. Berdasarkan pengakuan langsung pak Hery Setiawan selaku Ketua MLH PDM Kota Yogyakarta, secara keilmuan MLH PDM Kota Yogyakarta dinilai sudah cukup. Akan tetapi, dalam operasional program di lapangan, SDM yang ada dirasa sangat kurang. Kekurangan

SDM ini terlihat dari beberapa program maupun kegiatan yang secara bersamaan dikoordinatori oleh satu orang. Misalnya, Ketua sebagai koordinator di program Shodaqoh Sampah dan Eco Masjid. Kemudian, Sekretaris menjadi koordinator pada program Sekolah Sungai dan Memanen Air Hujan (Wawancara Hery Setiawan, 27/12/2018). Selain itu, beberapa anggota MLH di daerah khususnya PDM Kota Yogyakarta juga merangkap jabatan di MLH PPM, sehingga dalam seberapa kegiatan pun anggota MLH PDM Kota Yogyakarta mewakili MLH pusat.